



JUDUL

ANALISIS SOSIAL EKONOMI PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA TARIF IMPOR PANGAN DAN BAHAN PANGAN

**BIDANG KEGIATAN:
PKM-GT**

Diusulkan oleh:

Fajar Sakti Nur Hardiansyah	(B04080136) (2008)
Andini Kusumawardhani	(H44080004) (2008)
Anizza Dyah Kartika Maharani	(B04100069) (2010)

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2011**



LEMBAR PENGESAHAN PKM-GT

Judul Kegiatan : Analisis Sosial Ekonomi Peraturan Menteri Keuangan
Tentang Pembebasan Bea Tarif Impor Pangan dan Bahan
Pangan

1. Bidang Kegiatan : () PKM-AI (X) PKM-GT

2. Bidang Ilmu : Sosial Ekonomi

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap

: Fajar Sakti Nur Hardiansyah

b. NIM

: B04080136

c. Departemen

: Kedokteran Hewan

d. Institut

: Institut Pertanian Bogor

e. Alamat Rumah dan No Tel./HP

: Jalan S. Parman 23 Ngawi 63216

f. Alamat email

: drh.fajar45@gmail.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis

: 2 orang

5. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar

: Dr. Drh. Umi Cahyaningsih / Lektor
Kepala

b. NIP

: 19571007 198203 2 001

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP

: lab. Protozoologi, jl. Agatis Kampus
Darmaga, FKH-IPB Bogor

Bogor, 28 Februari 2011

Menyetujui,
Wakil Dekan FKH IPB

Ketua Pelaksana Kegiatan

Dr. Nastiti Kusumorini
NIP. 19621205 198703 2 001

Fajar Sakti Nur Hardiansyah
NIM. B04080136

Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan

Dosen Pendamping

Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS
NIP. 19581228 198503 1003

Dr. drh. Umi Cahyaningsih, MS
NIP. 19571007 198203 2 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada kami sehingga proposal PKM-GT berjudul “Analisis Sosial Ekonomi dari Kebijakan Bea Tarif Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011” dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

PKM-GT ini disusun untuk menjabarkan dampak dari penerapan kebijakan PMK Nomor 13/pmk.011/2011, serta berusaha untuk memberikan inspirasi solusi bagi pemegang kebijakan dan objek kebijakan agar dapat saling mengerti kondisi satu sama lain sehingga terjadi koordinasi dan komunikasi yang harmonis diantara keduanya.

Penulisan PKM-GT ini kami susun berdasarkan rasa kepedulian kami mengenai nasib para petani di Indonesia. Meski ruang lingkup pendidikan kami bukan berasal dari ilmu hukum maupun tentang keputusan kebijakan, kami berharap solusi dari hasil analisis dan pemikiran kami dapat bermanfaat bagi perkembangan pertanian Indonesia.

Proses penulisan PKM-GT ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pihak Institut Pertanian Bogor, yaitu: pihak rektorat, khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, pihak fakultas, khususnya Dekan Fakultas Kedokteran Hewan atas kesempatan yang telah diberikan.
2. Dosen pembimbing penulisan, yang telah memberikan bimbingan dalam pengerjaan proposal PKM-GT ini.
3. Orang tua penulis, yang telah memberikan do’a dan dukungannya.
4. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang ikut berperan serta dalam penyelesaian proses penulisan PKM-GT ini

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Amin.

Bogor, 28 Pebruari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN	v
DAFTAR TABEL	vi
PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Tujuan Penulisan.....	2
Manfaat Penulisan.....	2
GAGASAN	
Kondisi Singkat Pertanian Indonesia	3
Usaha-Usaha Yang Dilakukan Pemerintah.....	6
Solusi Yang Ditawarkan Dan Prediksi Hasil Di Masa Depan	7
Pihak Yang Dapat Membantu Mengimplementasikan Gagasan	9
Langkah Strategis Untuk Mengimplementasikan Gagasan	10
KESIMPULAN	11
DAFTAR PUSTAKA	11
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PEMBIMBING.....	13
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

Tingginya konsumsi hasil pertanian yang tidak diiringi dengan tingginya produksi hasil pertanian mengakibatkan stok pertanian menurun. Hal ini juga berpotensi mengakibatkan terjadinya krisis pangan. Menurunnya stok bahan pangan dunia menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara di dunia mengingat pangan merupakan kebutuhan primer manusia. Krisis ini tidak hanya berdampak bagi suatu negara secara umum, tetapi juga memberikan dampak khusus yang cukup signifikan kepada masyarakat didalamnya sehingga harga pangan menjadi tinggi dan daya beli masyarakat menjadi berkurang. Turunnya daya beli ini mengakibatkan terjadinya inflasi.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan tarif bea masuk bahan pangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.011/2011. Kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan stok dan harga pangan domestik. Inflasi dapat ditekan yang dibuktikan dengan peningkatan inflasi 0,89%. Angka tersebut akan jauh lebih besar jika pemerintah tidak memberlakukan kebijakan tersebut.

Namun, kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan baru. Terbukanya kran impor dikhawatirkan akan semakin menekan harga pangan domestik yang akan berakibat pada nasib petani. Selain itu, kebijakan ini juga membuat bangsa semakin memiliki ketergantungan terhadap produk luar yang justru berlawanan dengan tujuan pembangunan pertanian yaitu peningkatan ekspor pangan.

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara optimalisasi potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Jika potensi-potensi sumberdaya yang dimiliki dikelola dengan baik, terencana, terpadu, dan modern diyakini akan mampu meningkatkan kuantitas produksi sehingga memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia internasional.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pencapaian Indikator Makro Sektor Pertanian Indonesia Tahun 2005-2009	3
Tabel 2. Nilai Tukar Petani Indonesia Tahun 2005-2009	6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian. Kegiatan yang termasuk pertanian adalah pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan memiliki arti yang sangat penting dalam pembentukan berbagai realitas sosial ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Pangan adalah salah satu kebutuhan primer manusia untuk dapat terus mempertahankan hidup. Ketersediaan komoditas bahan pangan di dunia yang tidak merata mengakibatkan negara-negara di dunia saling bekerjasama untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan di negaranya. Bahkan, tidak sedikit negara yang berani menjajah negara lain hanya untuk menguasai ketersediaan komoditas bahan pangan dan kekayaan sumberdaya alam di negara tersebut.

Tingginya konsumsi hasil pertanian yang tidak diiringi dengan tingginya produksi hasil pertanian mengakibatkan bahan pangan menjadi semakin diperebutkan (Bustanul 2001). Kemungkinan adanya krisis pangan pun menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Harga cabai yang melambung beberapa waktu terakhir ini menjadi salah satu bukti adanya ketidakstabilan harga pangan yang terjadi di Indonesia.

Menurunnya stok bahan pangan dunia membuat negara-negara pengekspor beras seperti Thailand dan Vietnam kini membatasi produk eksportnya guna menjaga stok bahan pangan bagi kebutuhan negaranya. Negara-negara dengan pendapatan nasional yang tinggi berani membeli komoditas ekspor bahan pangan yang masih tersisa di pasar dunia dengan harga berapapun, meski harganya jauh melebihi harga pasaran sebelumnya. Tindakan yang ditempuh ini tidak hanya membawa dampak bagi suatu negara secara umum, tetapi juga memberikan dampak khusus yang cukup signifikan kepada masyarakat didalamnya. Inflasi menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan lagi (Gregory 2007).

Menanggapi hal-hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan tarif bea masuk bahan pangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241 Tahun 2010 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan stok dan harga pangan domestik. Impor barang yang merupakan bahan baku dikenakan tarif bea masuk 5-10 persen, sementara impor barang jadi atau barang konsumsi tidak dikenakan bea masuk atau nol persen. Kebijakan ini dianggap membebani para pelaku industri di dalam negeri (Yuni 2011). Kenaikan bea masuk atas bahan baku pangan dan bahan penunjang dapat mengganggu ketersediaan bahan pangan yang diproduksi secara domestik. Biaya

untuk memproduksi komoditas pangan menjadi semakin besar, bahkan melebihi harga belinya. Tingginya biaya produksi komoditas pangan menjadikan petani malas untuk memproduksi komoditas pangan, sehingga mengakibatkan produktivitas bahan pangan domestik berkurang dan semakin tergantung dengan budaya impor. Ketergantungan impor secara terus-menerus pada akhirnya akan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemberlakuan PMK ini tidak melalui proses sosialisasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan para pelaku di kalangan dunia usaha.

Menyikapi berbagai masalah yang timbul akibat PMK nomor 241 tahun 2010, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang bertujuan untuk merevisi kebijakan tersebut, yaitu PMK nomor 13/PMK.011/2011. Kebijakan yang tertuang dalam PMK nomor 13/PMK.100/2011 adalah agar pasokan pangan Indonesia tejamin. Salah satu akibat dari kebijakan ini adalah terbukanya kran impor Indonesia yang bertolak belakang dengan tujuan pemerintah yaitu meningkatkan ekspor.

Tujuan

Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui akibat positif dan negatif dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 serta menginspirasi solusi bagi pemegang kebijakan dan objek kebijakan agar dapat saling mengerti kondisi satu sama lain sehingga terjadi koordinasi dan komunikasi yang harmonis diantara keduanya.

Manfaat

Hasil karya tulis ini ditujukan untuk masyarakat sebagai konsumen, petani dan pengusaha sebagai objek kebijakan dan pemerintah sebagai subjek pembuat kebijakan. Manfaat dari karya tulis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai polemik yang timbul akibat diberlakukannya PMK 13/PMK.011/2011, serta dapat memberikan solusi yang efektif bagi seluruh aspek yang terlibat.

GAGASAN

Kondisi Singkat Pertanian Indonesia Saat Ini

Sektor perekonomian di Indonesia memberikan prestasi yang cukup menggembirakan. Secara makro, kinerja sektor pertanian telah mengakibatkan peningkatan produksi beberapa produk pertanian dan perkebunan, sehingga menjadikan terjaminnya ketersediaan energi dan protein. Selain itu, sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat besar dalam Produk Domestic Bruto (PDB) Indonesia, tercermin dari surplus perdagangan Indonesia yang mencapai US\$ 17,97 milyar yang melampaui targetnya, yaitu US\$ 13,13 milyar. Sektor pertanian juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia hingga mencapai lebih dari 100 ribu orang. Selain itu, daya serap tenaga kerja dalam sektor pertanian mencapai 40 juta orang lebih.

Tabel 1. Pencapaian Indikator Makro Sektor Pertanian Indonesia Tahun 2005-2009

Indikator Makro	2005	2006	2007	2008	2009*
Pertumbuhan PDB Pertanian Sempit (%)	2,50	3,20	3,40	5,16	4,2
Penyerapan Tenaga Kerja (ribu orang)	41.814	42.323	42.608	41.332	44.200
Tambahan Lapangan Kerja (ribu orang)	1.206	509	285	125	800

Sumber : Departemen Pertanian, 2010

* : angka sementara

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam latar belakang, krisis pangan menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa negara termasuk Indonesia. Penurunan pasokan dan kenaikan permintaan pangan menyebabkan kenaikan harga yang diperkirakan terus terjadi dimasa depan. Indonesia memiliki potensi yang besar disektor pangan. Lahan yang subur, iklim yang cocok dan SDM petani yang tangguh merupakan beberapa contoh potensi (swastika *et all.* 2007). Namun, potensi-potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Sumber pangan di Indonesia masih berpotensi untuk menciptakan swasembada pangan berkelanjutan dan meningkatkan peran dalam memasok kebutuhan pangan dunia.

Berkaca dari sejarah yang telah terjadi, timbulnya krisis pangan dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu :

1. Fenomena perubahan iklim dunia

Perubahan iklim dunia mengakibatkan pergeseran pola musim tanam. Banjir dan kekeringan menjadi faktor tak terduga dalam kegiatan pertanian saat ini. Prediksi jumlah hasil petanian yang akan di bangun menjadi sulit dilakukan.

2. Pertumbuhan penduduk lebih besar daripada pertumbuhan produksi bahan pangan. Berdasarkan data hasil produksi padi nasional, pertumbuhan produksi padi hanya 0,7 % per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun (Deptan 2010). Hal ini mengakibatkan seluruh produksi padi nasional habis diserap untuk kebutuhan pokok rakyat Indonesia, bahkan untuk memenuhi kekurangannya Indonesia harus mengimpor beras dari negara eksportir, seperti Thailand.
3. Indonesia lebih menyukai jalan pintas dalam mengatasi krisis pangan, yaitu dengan jalan melakukan impor
Pemerintah belum menunjukkan keberpihakan dan dukungan yang optimal bagi kemajuan system pertanian khususnya dalam system tataniaga. Pemerintah tidak mau ambil pusing dan justru lebih menyukai jalan pintas, yaitu impor, yang berdampak memburuknya keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Penanganan krisis pangan seharusnya bisa diatasi dengan pemberdayaan pertanian yang ada di Indonesia, tanpa harus mengimpor dan tergantung terhadap negara lain.
4. Penurunan lahan pertanian akibat konversi lahan
Lahan pertanian di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam tahun-tahun terakhir. Kepemilikan lahan pertanian dari seorang petani di Indonesia saat ini juga mengalami penurunan hingga menjadi kurang dari 0,5 hektar. Penurunan kepemilikan lahan pertanian petani ini dikarenakan adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Negara maju memiliki lahan yang sempit sehingga mereka memikirkan teknologi untuk menambah jumlah produksi. Sedangkan untuk negara berkembang masih memiliki lahan yang cukup luas, namun masih dibatasi oleh penguasaan teknologi sehingga produktivitas masih rendah. Menurunnya kepemilikan lahan pertanian petani tersebut mengakibatkan petani menjadi buruh dengan mengerjakan lahan pertanian milik para tengkulak dengan bayaran yang rendah.
5. Pilihan diversifikasi pangan yang kurang tepat
Salah satu contoh yaitu dengan mengonsumsi mie instan, dimana komoditas utama mie instan adalah gandum yang 100% didapat dari impor. Masyarakat Indonesia sangat tergantung terhadap konsumsi gandum. Olahan gandum seperti roti dan mie instan merupakan alternatif utama yang dipilih masyarakat Indonesia dalam diversifikasi pangan, padahal gandum merupakan komoditas impor Indonesia sepenuhnya. Gandum hanya bisa tumbuh di daerah subtropis seperti Amerika dan Eropa sehingga tidak bisa tumbuh di Indonesia yang merupakan daerah tropis. Pilihan masyarakat terhadap gandum dan produk olahannya akan menyebabkan ketergantungan terhadap gandum, dan sudah pasti ketergantungan terhadap impor gandum. Padahal di sisi lain, masih banyak alternatif-alternatif yang bisa dipilih masyarakat Indonesia dalam diversifikasi pangan, seperti singkong, jagung, ubi, atau sagu, yang merupakan komoditas original dari Indonesia.

6. Peningkatan komoditas pangan yang cukup tinggi untuk dikonversi sebagai *biofuel*.

Hal ini akibat dari meningkatnya harga minyak mentah dunia, sehingga banyak negara maju berusaha untuk mengembangkan bahan bakar alternatif yang terbuat dari bahan bakar nabati seperti jagung, kedelai, dan lainnya.

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting terhadap pembangunan ekonomi. (Inno 2011). Sektor pertanian bertanggungjawab dalam menyediakan kebutuhan pangan rakyat. Tanpa adanya dukungan dari sektor pertanian, suatu negara terpaksa harus impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang mengakibatkan tingginya harga pangan.

Krisis pangan merupakan faktor awal munculnya berbagai masalah ekonomi. mengingat masalah pertanian adalah masalah lintas sektoral yang dapat memicu permasalahan baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembebasan tarif bea masuk bahan pangan, yaitu PMK nomor 241 tahun 2010. Kebijakan ini menuai protes dari masyarakat khususnya petani dan pengusaha dalam negeri. Selain kurangnya sosialisasi sebelumnya dari pemerintah, kebijakan ini juga mengakibatkan kerugian bagi petani dan pengusaha pertanian. Setelah adanya evaluasi tentang kebijakan tersebut, kini pemerintah memberlakukan PMK nomor 13/pmk.011/2011 yang disahkan tanggal 24 Januari 2011 tentang penghapusan tarif impor pangan dan bahan pangan.

PMK ini menetapkan pembebasan tarif impor beberapa bahan pangan dan pangan. Hal ini bertujuan untuk memberi keringanan pada petani dalam proses produksinya. PMK ini membuat angka impor pangan Indonesia meningkat sehingga kebutuhan pangan Indonesia dapat tercukupi dan daya beli masyarakat tetap stabil sehingga inflasi dapat ditekan.

Namun, kebijakan ini menemui beberapa dampak dibidang ekonomi dan sosial. Beberapa dampak yang dapat dilihat setelah berjalannya kebijakan ini adalah sebagai berikut :

1. Anggaran dan pendapatan nasional akan tersedot untuk membiayai impor. Hal ini merupakan resiko yang pasti dialami dari pembebasan tarif impor. Data dari media ekonomi edisi 45 mengatakan bahwa anggaran yang dipakai pemerintah untuk menanggung bea masuk barang dan bahan produksi sebesar 2 triliun rupiah yang diatur dalam PMK 261/PMK.011/2010.
2. Ketergantungan terhadap pangan impor tinggi
Ketergantungan pangan ini jika dibiarkan terus-menerus akan merugikan Indonesia karena ketergantungan impor akan menurunkan ekspor netto dan menurunkan pendapatan nasional. Masyarakat Indonesia akan lebih menyukai barang-barang buatan luar negeri daripada barang buatan domestik, atau dengan kata lain terjadi “tren impor”.
3. Terbukanya impor dengan tarif 0% akan memberikan peluang terhadap barang-barang ilegal yang ikut menyertai barang impor tersebut menjadi semakin meningkat.
4. Petani tetap dalam kondisi yang dirugikan. Selama periode tahun 2005-2009, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) masih tercatat mendekati 100 (tabel 2). Hal

ini menunjukkan bahwa yang dibelanjakan petani masih lebih besar dari yang didapatkan. NTP sampai saat ini masih merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani, meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari kesejahteraan petani.

Tabel 2. Nilai Tukar Petani Indonesia Tahun 2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009*
NTP	93,50	95,73	100,00	98,99	100,79

Keterangan: * sampai dengan Oktober 2009, tahun 2007 sebagai tahun dasar

Sumber : BPS

Usaha-Usaha yang Pernah Dilakukan Pemerintah

Citra petani dan pertanian Indonesia seolah-olah menjadi symbol keterbelakangan, sebagai akibat kebijakan makro yang tidak berpihak pada pembangunan pertanian nasional. Sektor pertanian tetap menjadi sector nomor kesekian atau masuk ke dalam sector prioritas utama urutan paling akhir. Tanggal 1 Juni 2005, cabinet Indonesia Bersatu ingin mengangkat sector pertanian melalui konsep Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK). Hampir 1,5 tahun lebih berlalu, banyak pihak menilai bahwa RPPK ini merupakan tindakan dan kebijakan yang hampir tidak terealisasi. Terbukti dimana kita masih gagal dalam manajemen perbesaran dan ketahanan pangan. Minggu ketiga Januari 2007, impor beras yang masuk ke Indonesia sekitar 308.000 ton dari 500.000 ton yang telah disepakati. RPPK merupakan blue print pembangunan pertanian nasional, namun strategi pembangunan perekonomian lebih condong kepada pembangunan dan peningkatan sector industry ataupun manufaktur yang berbasis non-pertanian dan property.

Sejak disepakati perjanjian perdagangan sector multilateral di sector pertanian yakni *Agreement on Agriculture* (AoA) pada tahun 1994, telah terjadi penyesuaian kebijakan nasional masing-masing negara *World Trade Organization* (WTO). Di dalam AoA dimuat kesepakatan negara anggota untuk melaksanakan:

1. Perluasan akses pasar produk untuk pertanian melalui pengurangan tariff dan ratifikasi non tariff
2. Pengurangan subsidi ekspor
3. Penurunan subsidi domestic

Kesepakatan yang ketiga ini menuai banyak perbincangan dalam forum-forum WTO. Negara-negara maju menginginkan negara berkembang untuk mengurangi bahkan mencabut subsidi sehingga akan memperlemah petani negar tersebut dan merusak sector pertanian mereka sehingga secara perlahan produk-produk negara maju akan memasuki negara kecil, seperti yang terjadi di Indonesia.

Kesepakatan tersebut awalnya diharapkan mampu menciptakan perdagangan dunnia yang lebih terbuka, transparan, dan non-diskriminatif. Semua anggota WTO diharapkan dapat menghilangkan hambatan perdagangan non-tarif, secara bertahap

mengurangi tariff, harus menghapus subsidi, serta mengurangi atau menghapus kebijakan yang masih bisa mendistorsi perdagangan bebas yang adil. Tapi kenyataannya, ‘masih jauh panggang dari api’, merupakan pepatah yang sesuai jika menggambarkan kondisi yang ada dari kesepakatan awal tersebut. Kesepakatan tersebut seolah-olah hanya berlaku bagi negara-negara berkembang dan tidak bagi negara maju. Keadilan perdagangan hanya sebagai jargon dan slogan negara maju disetiap siding-sidang di WTO, dan bahkan negara-negara maju lebih besar lagi memberikan subsidi kepada petaninya.

Solusi Yang Ditawarkan dan Prediksi Hasil di Masa Depan

Kondisi Indonesia yang tertahan karena permasalahan yang tersimpan dan tidak kunjung diselesaikan merupakan sikap yang harus dipikirkan secara mendalam dan serius. Permasalahan yang seharusnya dapat berakhir cepat dan tuntas menjadi panjang dan berbelit akibat adanya sentuhan politik di berbagai bidang. Bahkan, strategi isu baru menutup isu lama membuat perhatian masyarakat Indonesia terpalingkan.

Begitupun juga permasalahan pertanian yang sedang terjadi saat ini, pihak-pihak terkait harus focus dan konsisten dalam menangani permasalahan ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai sebuah solusi dalam penanganan krisis pangan adalah sebagai berikut:

1. Mitigasi iklim

Mitigasi perubahan iklim adalah proses mengupayakan berbagai tindakan preventif untuk meminimalisasi berbagai dampak perubahan iklim yang akan terjadi. Indonesia memiliki lembaga yang bekerja dalam bidang iklim. Ahli-ahli klimatologi juga banyak dimiliki oleh Indonesia. Perubahan iklim dan antisipasinya sudah diperkirakan oleh lembaga pemerintah beserta ahli-ahli klimatologi. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal.

Perubahan iklim dapat mengakibatkan pergeseran waktu tanam dan panen pertanian. Komunikasi yang terintegrasi antara pihak yang ahli di bidang iklim, pembuat kebijakan, dan petani sangat diperlukan. Dengan adanya komunikasi tersebut akan memberikan informasi terkait tentang iklim dan kegiatan pertanian. Iklim yang diinformasikan oleh lembaga pemerintah dapat menentukan waktu tanam beserta varietas yang cocok untuk ditanam serta perkiraan panen mendatang.

2. Evaluasi system data yang dimiliki sebagai dasar penentu kebijakan

Pertanian memiliki cakupan bidang yang sangat luas sehingga dalam pemerintahan, pertanian dibagi kedalam beberapa lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk penanganan pelayanan dalam beberapa sector di bidang pertanian dapat terfokus. Namun, belum ada instansi yang ditunjuk sebagai coordinator untuk menangani masalah pertanian.

Contohnya dalam hal kebijakan impor beras. Pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki data yang berbeda. Pemerintah mengatakan untuk tahun ini membutuhkan impor beras dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Namun, BPS mengatakan untuk tahun 2011 stok pangan domestic akan surplus beras 6,84 juta ton, ditambah surplus ditahun 2010 sebesar 5,61 juta ton. Kebijakan Penggunaan data sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil, sehingga penggunaan data yang kurang tepat akan melahirkan kebijakan yang berbeda mengenai jumlah stok beras domestik. kurang tepat pula. Solusi agar terjadi kesamaan data antar pihak terkait yaitu dengan menjalin komunikasi yang terintegrasi. Keakuratan data menentukan ketepatan kebijakan yang akan diberlakukan.

3. Alokasi dana insentif kepada petani

Dana insentif yang diberikan pemerintah Indonesia kepada para petani adalah berupa subsidi terhadap input-input produksi pertanian, seperti pupuk dan bibit unggul. Subsidi ini akan membantu petani Indonesia dalam pemenuhan input-input produksi pertanian sehingga produksi pertanian dapat terus berjalan. Pemberian dana insentif kepada petani dengan cara seperti ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap produktivitas pertanian, berbeda dengan yang terjadi di negara maju dimana dana insentif yang diberikan kepada petani bebas digunakan untuk apa saja demi meningkatnya produktivitas pertanian mereka.

4. Mengamankan pasar domestic dari produk impor illegal

Pasar domestic merupakan jantung dari kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat suatu negara. Untuk itu, keberadaan pasar domestic harus terus dijaga agar tidak teguncang oleh permasalahan-permasalahan yang timbul. Salah satunya yaitu masuknya barang-barang impor illegal yang sering menyertai kedatangan barang impor. Barang impor illegal yang bisa masuk Indonesia tanpa terdeteksi dan dengan mudahnya beredar di pasar domestic akan mengakibatkan terguncangnya pasar domestic dan menyebabkan kerugian bagi Indonesia secara agregat. Untuk itu diperlukan pengawalan yang ketat dari pemerintah beserta jajarannya dalam pemberlakuan sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

5. Kampanye Cinta Produk Indonesia

Produk Indonesia yang dihasilkan oleh para petani domestic pada kenyataannya tidak semuanya diminati oleh konsumen. Banyak konsumen yang lebih memilih produk-produk buatan luar negeri meskipun kualitas produknya sama. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam upaya mengkampanyekan cinta produk Indonesia untuk menyelamatkan eksistensi produk domestic di masyarakat.

6. Program diversifikasi pangan

Mindset yang ada dalam benak masyarakat adalah beras sebagai satu-satunya bahan pemenuhan kebutuhan pangan. Diperlukan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat untuk mengubah *mindset* tersebut bahwa banyak terdapat komoditas pemenuhan kebutuhan komoditas pangan di

Indonesia, seperti jagung, sagu, ubi, kentang, dan lain-lain yang mempunyai nilai gizi yang sebanding seperti yang ada dalam beras.

Pihak-Pihak Yang Dapat Membantu Mengimplementasikan Gagasan

1. Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan instansi vital dibidang pertanian. Instansi ini diharapkan memegang keputusan mengenai permasalahan-permasalahan pertanian sekaligus menjadi coordinator penanggulangan permasalahan pertanian
2. Kementerian Perindustrian
Instansi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementan mengenai inovasi-inovasi industry yang dapat dikembangkan disector pertanian Indonesia
3. Menteri Keuangan
Merupakan instansi yang menangani tentang aliran keuangan negara. Instansi ini merupakan mitra Kementan dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keuangan
4. Menteri Perdagangan
Bekerja sama dengan Menkeu untuk menetapkan impor-ekspor sesuai dengan rekomendasi dari Kementan
5. Kementrian Kelautan Perikanan
Berkoordinasi mengenai potensi-potensi pertanian di sector perikanan dan kelautan
6. Petani
Petani sebagai actor utama dalam kegiatan produksi pertanian
7. Pengusaha dalam bidang pertanian
8. Pemerintah Daerah (Pemda) beserta jajarannya
Pemda merupakan jembatan antara pemerintah pusat dengan pelaksana pertanian. Diharapkan kebijakan dan segala sesuatu terkait dengan pertanian dapat terdistribusikan secara sinergis karena di daerah sering terjadi kebijakan-kebijakan daerah yang justru merepotkan petani itu sendiri.
9. Badan Meteorologi dan Geofisika
Meprediksi iklim dan member masukan tentang varietas tanaman yang cocok untuk ditanam pada waktu bersangkutan
10. Organisasi-organisasi petani
Organisasi ini merupakan mitra pemerintah dan petani dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian.

Langkah Strategis Untuk Mengimplementasikan Gagasan

Pembangunan ekonomi suatu bangsa senantiasa berorientasi pada upaya perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya sekedar tercukupinya kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup kemandirian untuk melepaskan diri dari ketergantungan dan kemiskinan.

Sebagai negara agraris yang sedang berkembang, Indonesia memiliki potensi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jika potensi-potensi sumberdaya yang dimiliki dikelola dengan baik, terencana, terpadu, dan modern diyakini akan mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia internasional.

Pembangunan pertanian hanya bisa berhasil jika masyarakat dan seluruh *stakeholders* memiliki kesamaan visi dan misi, kesamaan langkah dan perjuangan dalam membangun pertanian di Indonesia. Beberapa langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan pertanian yaitu:

1. Mewujudkan kedaulatan pangan dengan cara meningkatkan produksi pertanian khususnya komoditas bahan pangan
2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk agar semua kebutuhan penduduk dapat terakomodir dengan baik
3. Masalah pangan adalah masalah lintas sektoral, sehingga dibutuhkan koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, maupun antar departemen
4. Menggagas dan mengusulkan pemerintah untuk membentuk suatu lembaga, misalnya Komisi Nasional (Komnas) Petani Indonesia yang dapat melihat secara jernih dan mempunyai kemampuan baik secara politik maupun hukum untuk memperjuangkan nasib petani
5. Mendorong pemerintah dan legislative untuk melahirkan produk hukum yang melindungi lahan pertanian produktif agar dapat tetap dipertahankan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional
6. Meminta pemerintah untuk mensinergiskan program-program kerja pertanian secara lintas sektoral agar padu dan serasi dengan berlandaskan kepada peningkatan dan pemerataan aspek social ekonomi masyarakat ekonomi di pedesaan. Salah satu pengembangan pertanian terpadu tersebut adalah penetapan dan akselerasi pembangunan kawasan agropolitan dan minapolitan sesuai dengan agroekosistem setempat
7. Mempermudah petani mendapatkan modal kerja dengan cara menggagas komite kredit pinjaman petani yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan langsung di bawah koordinasi Bupati/Walikota
8. Mempercepat pembangunan sektor pertanian dengan menerapkan prinsip kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas (K3) secara terintegrasi. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan pertanian rakyat melalui dinsa/instansi teknis terkait, serta pola kemitraan yang saling menguntungkan antara pengusaha dengan pertanian rakyat

9. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang diversifikasi pangan dan cinta produk Indonesia

KESIMPULAN

Menurunnya stok bahan pangan dunia membuat kekhawatiran negara-negara di dunia akan terjadinya krisis pangan. Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi yang tinggi mengkhawatirkan akan datangnya krisis pangan sehingga pemerintah memunculkan kebijakan melalui PMK 13/pmk.011/2011. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan lain yaitu terbukanya kran impor pangan yang dikhawatirkan akan menjatuhkan harga pangan domestic dan menimbulkan ketergantungan impor bagi masyarakat Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah bijak seperti, melakukan rekoordinasi dan antisipasi bersama pihak-pihak terkait masalah pertanian, melakukan optimalisasi potensi sumber daya Indonesia dengan langkah-langkah yang terencana dan terpadu, memberikan penyuluhan akan artinya produk dalam negeri dalam menyumbang angka devisa, serta memberikan motivasi dan penghargaan yang besar untuk petani agar petani-petani Indonesia tetap semangat dan giat bekerja dalam memenuhi gizi masyarakat Indonesia.

Setelah melakukan upaya tersebut, diharapkan dalam jangka pendek, Indonesia sanggup berbenah diri dan menemukan rasa kepercayaan diri di bidang pertanian. Dalam jangka panjang diharapkan Indonesia mampu melakukan ekspor di bidang pertanian sehingga terciptanya kedaulatan pertanian yang berujung pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. *Impor Mesin Tekstil Tak Lagi Bebas Bea*. Textile News. 2 (2):1.
- Arifin, Bustanul. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 9*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2010. *Berita Resmi Statistik*. No. 40/07/35/VIII. Hal: 1-12
- Gunawan AW, Achmadi SS, Arianti L. 2004. *Pedoman Penyajian Karya Ilmiah*. Bogor:IPBPress. <http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWgeneral.html> diakses tanggal 24 Februari 2011
- Jemabut, Inno. 2011. *Liberalisasi Pertanian Indonesia Bisa Krisis Pangan*. Sinar harapan. Jumat 11 Februari 2011.
- Mankiw, Gregory. 2007. *Macroeconomics 6th Edition*. New York: Worth Publishers.

- Naibaho, Yuni. 2011. *Petani Bakal Sengsara Terpukul Beras Impor*. Medan Bisnis. Rabu 9 Februari 2011.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/Pmk.011/2010 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/Pmk.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
- Solahuddin, Soleh. 1999. *Visi Pembangunan Pertanian*. Bogor: IPB
- Suprihatini. 2004. *Kebijakan Percepatan Pengembangan Industri Hilir Perkebunan: Kasus Teh dan Kelapa Sawit*. Bogor: Lembaga Riset Perkebunan Indonesia.
- Swastika, Dewa K.S., Wargiono J., Soejito, dan Hasanudin A. 2007. *Analisis Kebijakan Peningkatan Produksi Padi Melalui Efisiensi Pemanfaatan Lahan Sawah di Indonesia*. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume. 5, No. 1, Hal: 36-52.
- <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14555> diakses tanggal 22 Februari 2011

Lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PEMBIMBING

Nama Lengkap : Dr.drh. Umi Cahyaningsihm MS.
Nip : 19571007 198203 2 001
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 7 Oktober 1957
Alamat : lab. Protozoologi, jl. Agatis Kampus Darmaga, FKH-
IPB Bogor
Pangkat/gol : Lektor kepala/IV
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Bogor, 28 Pebruari 2011

DR. drh. Umi Cahyaningsih, MS.

NIP. 19571007 198203 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Nama Lengkap : Fajar Sakti Nur Hardiansyah
Nama Panggilan : Fajar/Sakti
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 01 Oktober 1989
Jurusan/Angkatan : Kedokteran Hewan/45
Alamat : Jalan Jend. S. Parman no. 2 Ngawi Jawa Timur 63216
Alamat di Bogor : Wisma An-nur Gg. Babakan Raya I, RT III/RW I
Dramaga Bogor
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
- Riwayat Pendidikan :
- SDN Margomulyo III Ngawi (1996-2002)
 - SMPN 2 Ngawi (2002-2005)
 - SMAN 2 Ngawi (2005-2008)
- Riwayat prestasi :
- Juara II Dimas Diajeng Kab Ngawi th. 2007
 - Paskibraa Nasional th. 2007
 - Duta belia Indonesia th. 2007
 - Peraih *the best humor film* dalam festival film Smada th. 2008
 - Peraih SMADA Awards kategori bela negara th. 2008
 - Juara II lomba nasyid Al-Huriah th. 2008
 - The best Traditional Dance “Reog Ponorogo” Festival Olahraga Tradisional dan Budaya Nusantara 2008
- Riwayat Organisasi :
- BEM TPB 45 (staf Kajian dan Strategi/2008-2009)
 - DPM FKH IPB (komisi I/2009-2010)
 - HIMPRO Satwaliar FKH IPB (anggota/2009-2010)
 - IMAKAHI IPB (staf Kaderisasi/2009-2010)
 - HIMPRO Satwaliar (staf Pendidikan/2010-sekarang)
 - BEM KM IPB Kabinet IPB Bersahabat (staf Kementrian Pertanian/2010-sekarang)
 - IMAKAHI IPB (staf Kajian dan Strategi/2010-sekarang)

Bogor, 28 Pebruari 2011

Fajar Sakti Nur Hardiansyah
B04080136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Nama Lengkap : Andini Kusumawardhani
Nama Panggilan : Dini
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 8 Januari 1990
Jurusan/Angkatan : Ekonomi Sumberdaya Lingkungan/45
Alamat : Jalan Anjani no. 20A Pakunden-Ponorogo Jawa Timur
63416
Alamat di Bogor : Babakan Lebak RT II/RW V Bogor
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Riwayat Pendidikan :

1. TK Batik Bhakti Ponorogo (1993-1996)
2. SD Ma'arif Ponorogo (1996-2002)
3. SMP Negeri I Ponorogo (2002-2005)
4. SMA Negeri I Ponorogo (2005-2008)
5. Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (2008-sekarang)

Organisasi yang pernah diikuti :

- Purna Paskibraka Indonesia kabupaten Ponorogo (2006-sekarang)
- Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Pejuang 45 (2008-2009)
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kabinet Orange Beraksi (2009-2010)
- Ikatan Mahasiswa Jawa Timur di Bogor (2008-sekarang)
- Keluarga Mahasiswa Ponorogo di Bogor (2008-sekarang)

Prestasi yang Pernah Diraih :

- Nominasi Penyaji Terbaik Festival Teater se Jawa-Bali (2008)
- Pasukan Pengibar Bendera IPB 2008-2009
- The best Traditional Dance "Reog Ponorogo" Festival Olahraga Tradisional dan Budaya Nusantara 2008
- Special Performance "Reog Ponorogo" Gebyar Nusantara 2009

Bogor, 28 Pebruari 2011

Andini Kusumawardhani

H44080004



Nama Lengkap : Anizza Dyah Kartika Maharani
Nama Panggilan : Nisa
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 22 Juni 1992
Jurusan/Angkatan : Kedokteran Hewan/47
Alamat : Jl. Majapahit 783 Jogorogo Ngawi Jawa Timur
Alamat di Bogor : Asrama Tingkat Persiapan Bersama IPB
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Riwayat Pendidikan :
1. TK Parmadiswi 1 Surakarta (1996-1998)
2. SD Muhammadiyah 1 Surakarta (1998-2001)
3. SDN Jogorogo 1 (2001-2004)
4. SMPN 2 Ngawi (2004-2007)
5. SMAN 2 Ngawi (2007-2010)
6. Fakultas Kedokteran Hewan Institut Peratnian Bogor (2010-sekarang)

Bogor, 28 Pebruari 2011

Anizza Dyah Kartika Maharani
B04100069